



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **EMA RACHMAWATI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **214735**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **4.949.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/100 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 261 m2 di KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 267 m2 di KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
4. Tanah Seluas 178 m2 di MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
5. Tanah Seluas 72 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
6. Tanah Seluas 323 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
7. Tanah Seluas 324 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 324.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 401 m2/401 m2 di KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **270.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.5 G A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
2. MOTOR, HONDA ACB2J21B02 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA ACB2J22B03 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	36.300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	273.666.074
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.528.966.074
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.528.966.074

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.